

Perspektif Mahasiswa PPKN FKIP terhadap Pemilu melalui Media Sosial: Studi Kasus di Universitas Pamulang

Mickael Putra Johanies¹, Sulastr²

^{1,2}Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Pamulang

mickhaelputrajohanies@gmail.com¹, dosen02081@unpam.ac.id²

Abstract

This study aims to explore the perspectives of students in the Civic Education Study Program (PPKn), FKIP, Universitas Pamulang, regarding elections through the use of social media, and to identify the factors that influence the formation of such perspectives. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with ten purposively selected informants and analyzed using open coding, axial coding, and selective coding stages. The findings reveal that students hold positive, critical, and reflective views on the implementation of elections. Social media platforms such as TikTok, Instagram, and X (Twitter) serve as the main sources of political information accessed by students, supported by their digital literacy in verifying, clarifying, and filtering content. Internal factors influencing student perspectives include their civic education background and personal awareness as citizens, while external factors involve the flow of information on social media, campus peer environments, and ongoing social discussions.

Keywords:

Student Perspectives
Elections
Social Media

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Pamulang terhadap pemilu melalui penggunaan media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan perspektif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, dan dianalisis melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang positif, kritis, dan reflektif terhadap pelaksanaan pemilu. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) menjadi sumber utama informasi politik yang diakses oleh mahasiswa, didukung oleh kemampuan literasi digital melalui verifikasi, klarifikasi, dan penyaringan konten. Faktor internal yang memengaruhi terbentuknya perspektif mahasiswa meliputi latar belakang pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran pribadi sebagai warga negara, sedangkan faktor eksternal mencakup arus informasi di media sosial, lingkungan pertemanan kampus, serta dinamika diskusi sosial yang berkembang.

Corresponding Author:

Mickael Putra Johanies
Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pamulang
Email: mickhaelputrajohanies@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui pemilu, warga negara diberi hak untuk menentukan arah kebijakan negara dan memilih para pemimpin yang merepresentasikan kehendak rakyat. Di Indonesia, pemilu telah menjadi tradisi politik yang penting dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta

diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme formil untuk pergantian kekuasaan, tetapi juga simbol legitimasi dari partisipasi rakyat dalam proses demokratis. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara.

Namun demikian, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya partisipasi pemilih pemula, praktik politik uang, polarisasi politik, hingga maraknya disinformasi dan kampanye negatif menjadi persoalan yang menghambat tujuan ideal dari demokrasi elektoral. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih usia muda dalam Pemilu 2019 tergolong tinggi secara kuantitas, namun masih rendah dari segi kualitas pemahaman politik. Hal ini menandakan bahwa antusiasme belum sepenuhnya diiringi oleh literasi politik yang memadai. Generasi muda, khususnya mahasiswa, masih rentan terhadap pengaruh informasi yang bersifat manipulatif, khususnya di media sosial.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, media sosial kini menjadi saluran utama dalam penyebaran informasi politik, termasuk kampanye pemilu. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) menjadi ruang digital di mana informasi politik beredar luas dan cepat. Bagi generasi muda, media sosial bukan hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga menjadi ruang diskusi politik, alat edukasi, bahkan arena pertarungan wacana politik. Laporan dari We Are Social dan Hootsuite (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial, dan sebagian besar berasal dari kalangan muda usia 18–34 tahun. Angka ini menunjukkan betapa besar potensi media sosial dalam membentuk perspektif politik generasi muda.

Di sisi lain, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan polarisasi yang diperkuat oleh algoritma digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023) menyebutkan bahwa kelompok usia muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan konten menyesatkan, karena belum semua memiliki kecakapan literasi digital yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi cara mereka memaknai informasi politik dan membentuk opini, termasuk dalam konteks pemilu.

Dalam konteks ini, peran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting. Mahasiswa yang berasal dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pamulang, secara akademis dibekali dengan wawasan mendalam tentang sistem demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi, tetapi juga mendorong pembentukan sikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan sosial-politik, termasuk dalam menyikapi informasi di media sosial.

Sebagai calon guru pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa PPKn memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pemilih aktif sekaligus agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana mereka memaknai pemilu dan bagaimana media sosial berkontribusi dalam membentuk sikap serta orientasi politik mereka. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wicaksono, dkk. (2024), telah menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini politik mahasiswa. Namun, kajian yang menitikberatkan pada mahasiswa PPKn sebagai kelompok dengan latar pendidikan kewarganegaraan masih sangat terbatas.

Lebih jauh, perlu dipahami pula bagaimana faktor internal (seperti nilai pribadi, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, serta pengaruh lingkungan keluarga) dan faktor eksternal (seperti media sosial, opini teman sebaya, dan dinamika politik nasional) berkontribusi terhadap pembentukan perspektif mahasiswa terhadap pemilu. Hal ini penting agar strategi pendidikan politik dapat dirancang secara lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan aktual mahasiswa.

Namun demikian, meskipun mahasiswa PPKn dibekali secara teoritis dengan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, tidak serta merta menjamin bahwa mereka bebas dari pengaruh informasi yang menyesatkan atau sikap apatis terhadap pemilu. Dibutuhkan penelitian empiris untuk melihat sejauh mana pemahaman, sikap, dan perilaku politik mereka terbentuk dalam konteks digital saat ini. Di sinilah letak urgensi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam perspektif mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang terhadap pemilu melalui penggunaan media sosial, dengan menelaah bagaimana media sosial memengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, dan bertindak dalam konteks demokrasi elektoral. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor internal seperti latar belakang pendidikan, nilai pribadi, dan pengalaman organisasi, serta faktor eksternal seperti media sosial, diskusi antar teman, dan dinamika opini publik yang berkembang di lingkungan kampus. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan literasi politik berbasis digital dan strategi pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami makna subjektif dari perspektif mahasiswa terhadap pemilu melalui penggunaan media sosial (Sugiyono, 2018). Studi kasus digunakan agar peneliti dapat mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, khususnya terhadap mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Pamulang yang dipilih secara purposive.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Penggunaan berbagai teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang kaya dan bervariasi, serta meningkatkan keabsahan melalui triangulasi sumber.

Data dianalisis menggunakan teknik pengkodean yang mengacu pada Strauss dan Corbin, yaitu melalui tiga tahap: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Tahap *open coding* digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep penting dari data, *axial coding* mengelompokkan konsep menjadi kategori, dan *selective coding* menyatukan kategori menjadi tema sentral yang menjawab fokus penelitian. Proses analisis ini dilanjutkan dengan tahap interpretasi, yaitu penafsiran data secara mendalam untuk memahami pola, hubungan, dan makna yang relevan terhadap fenomena yang dikaji (Risnita, 2024).

Pemilihan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus memungkinkan peneliti menangkap dinamika pemahaman mahasiswa dalam konteks sosial, budaya, dan digital yang melingkupinya. Dengan demikian, metode ini dinilai paling sesuai untuk menjawab tujuan penelitian secara mendalam dan kontekstual.

3. PEMBAHASAN

Dalam membahas jawaban dari Perspektif Mahasiswa terhadap Pemilu melalui Media Sosial ini didapati Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Pamulang memiliki pandangan yang reflektif, kritis, dan partisipatif terhadap pelaksanaan pemilu, khususnya dalam konteks era digital yang semakin mengintegrasikan media sosial dalam dinamika politik. Dalam proses coding dan analisis data kualitatif, ditemukan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami pemilu sebagai kewajiban formal, melainkan juga sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai demokrasi dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Beberapa informan menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara yang sadar politik. Informan AL, misalnya, menyatakan bahwa melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi dan mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan nasional. Pandangan ini sejalan dengan konsep "citizen responsibility" dari Westheimer dan Kahne, yang menempatkan warga negara sebagai agen aktif dalam kehidupan publik, bukan sekadar penerima kebijakan. Mahasiswa memandang hak pilih bukan sebagai rutinitas politik semata, tetapi sebagai sarana untuk mengekspresikan sikap politik yang rasional dan bertanggung jawab.

Media sosial menjadi arena utama dalam membentuk perspektif mahasiswa terhadap isu-isu politik dan pelaksanaan pemilu di era digital. Perubahan lanskap komunikasi politik dari yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi interaktif telah menjadikan media sosial sebagai kanal baru yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, hingga membangun kesadaran kolektif. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik virtual di mana diskursus politik berlangsung secara masif dan terbuka. Mahasiswa, sebagai bagian dari generasi digital native, memanfaatkan platform-platform ini secara intensif untuk mengakses informasi politik, mengikuti dinamika kampanye, menyimak debat kandidat, hingga turut menyuarakan pandangan mereka sendiri terhadap isu-isu kebangsaan.

Namun, meskipun berada dalam pusaran arus informasi yang sangat cepat dan tak jarang bias, mahasiswa dalam penelitian ini tidak menunjukkan sikap pasif atau mudah terpengaruh begitu saja. Justru sebaliknya, mereka memperlihatkan kemampuan literasi digital yang cukup baik, ditandai dengan sikap kritis dalam memverifikasi kebenaran informasi, membandingkan berbagai sumber, dan menahan diri untuk tidak menyebarkan konten provokatif atau hoaks. Beberapa informan bahkan mengungkapkan bahwa sebelum membagikan konten politik, mereka akan terlebih dahulu memeriksa sumbernya dan mencari informasi pembandingan dari media yang kredibel. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor aktif dalam menjaga kualitas ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Kecakapan literasi digital ini tidak terbentuk secara instan, tetapi merupakan hasil dari pengalaman belajar, paparan informasi yang terus-menerus, serta kesadaran akan pentingnya menjaga integritas informasi publik. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kemampuan ini menjadi modal penting bagi mahasiswa dalam membangun nalar kritis yang diperlukan untuk menavigasi berbagai narasi politik di ruang digital. Mereka tidak hanya membaca atau menonton konten, tetapi juga mengevaluasi intensi di baliknya, mengenali bias, serta menilai dampak sosial-politik dari konten tersebut. Sikap seperti ini merupakan manifestasi dari

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking skills) yang sangat dibutuhkan dalam era informasi yang hiperaktif.

Lebih jauh, partisipasi mahasiswa di media sosial tidak hanya bersifat reaktif terhadap isu-isu yang muncul, tetapi juga proaktif dalam memproduksi dan menyebarkan konten-konten yang bersifat edukatif dan konstruktif. Mereka mengambil peran sebagai penyambung informasi yang bermutu, mengedukasi sesama mahasiswa maupun masyarakat umum melalui konten yang lebih mudah diakses dan dicerna.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan AP yang menyampaikan bahwa sebelum menyebarkan informasi politik, dirinya selalu memastikan keabsahan data dari sumber resmi atau media kredibel. Kemampuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan sebagai filter sosial yang menjaga kualitas diskursus politik di media sosial.

Penelitian Mustopa (2024) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa mahasiswa generasi digital memiliki kecakapan tinggi dalam mengakses, mengevaluasi, dan menyeleksi informasi politik. Selain itu, penelitian Achmad & Dwimawanti (2024) menegaskan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan keterlibatan politik generasi muda. Mahasiswa dalam penelitian ini tidak hanya terlibat dalam diskusi daring, tetapi juga aktif menyuarakan opini politik, bahkan menciptakan konten kampanye yang positif dan edukatif.

Keterlibatan mahasiswa dalam pemilu juga dipengaruhi oleh proses pendidikan kewarganegaraan yang mereka terima selama di bangku kuliah. Mata kuliah seperti Hukum Tata Negara, Pendidikan Demokrasi, dan Sosiologi Politik membentuk pemahaman yang mendalam mengenai struktur politik, hak-hak warga negara, dan pentingnya partisipasi aktif dalam sistem demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk pola pikir politik mahasiswa dan memperkuat kapasitas mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa diskusi antar teman, dosen, maupun aktivitas organisasi di kampus turut membentuk cara pandang mereka terhadap pemilu. Mereka menyebutkan bahwa ruang-ruang diskusi tersebut menjadi tempat untuk menguji argumen, memperluas perspektif, dan memperdalam pemahaman terhadap isu politik. Namun demikian, mayoritas mahasiswa menekankan pentingnya sikap independen dalam menentukan pilihan politik, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan rasionalitas dalam membuat keputusan.

Berdasarkan hasil coding dan pengelompokan tematik yang dilakukan secara sistematis, peneliti merumuskan tiga kategori utama yang mencerminkan perspektif mahasiswa terhadap pemilu melalui media sosial. Ketiga kategori ini menggambarkan secara holistik bagaimana mahasiswa memaknai peran mereka sebagai warga negara muda dalam sistem demokrasi digital, sekaligus menunjukkan dinamika berpikir mereka yang berkembang dari hasil pendidikan, pengalaman, dan interaksi sosial selama menjalani masa studi.

Yang pertama adalah Kesadaran Demokratis dan Tanggung Jawab Politik Mahasiswa. Mahasiswa menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pemilu dalam konteks demokrasi modern. Mereka tidak hanya memahami aspek prosedural seperti teknis pemungutan suara, tetapi juga menyadari bahwa hak pilih merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Hak suara bagi mereka dipandang sebagai instrumen partisipatif yang memungkinkan terwujudnya kedaulatan rakyat. Beberapa informan bahkan menegaskan bahwa menggunakan hak pilih merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap arah masa depan bangsa. Pemilu bukan sekadar ajang politik lima tahunan, melainkan ruang ekspresi kesadaran sipil dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Sikap ini mencerminkan kematangan politik yang dibentuk dari akumulasi pendidikan formal, diskusi kampus, serta interaksi dengan lingkungan sosial yang demokratis. Mahasiswa memandang dirinya sebagai bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga kualitas demokrasi melalui partisipasi yang aktif dan cerdas.

Yang kedua yaitu Peran Media Sosial sebagai Arena Literasi dan Partisipasi Politik. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi saluran utama bagi mahasiswa dalam mengakses, memahami, dan mendiskusikan informasi politik. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik digital tempat berbagai ide, narasi politik, dan kampanye disebarluaskan. Mahasiswa menunjukkan kemampuan adaptif dalam menggunakan media sosial secara kritis. Mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif menciptakan dan menyebarkan konten politik yang bersifat edukatif. Dalam wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa mereka rutin membagikan informasi politik berupa infografis, kutipan hukum, atau ulasan isu politik yang dikemas secara menarik dan ringan. Aktivitas ini menandakan bahwa media sosial telah dimaknai tidak hanya sebagai alat hiburan, melainkan juga sebagai medium literasi politik yang mampu menjangkau masyarakat luas. Di sinilah mahasiswa berperan sebagai *digital citizen*, yaitu warga negara yang melek digital dan berpartisipasi aktif dalam diskursus politik secara bertanggung jawab. Media sosial menjadi instrumen strategis yang mempertemukan literasi politik dan keterlibatan demokratis dalam satu ekosistem yang saling memengaruhi.

Yang ketiga yaitu Kemandirian Berpikir dan Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan. Mahasiswa PPKn memiliki kecenderungan untuk bersikap kritis, independen, dan rasional dalam menentukan pilihan serta menyikapi isu politik. Mereka menyatakan bahwa keputusan politik harus didasarkan pada pemahaman substansial, bukan sekadar ikut-ikutan arus opini publik. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai fondasi dalam membentuk cara berpikir tersebut, terutama melalui materi tentang hak dan kewajiban warga negara, etika politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah seperti Pendidikan Demokrasi dan Kewarganegaraan Digital telah mendorong mereka untuk berpikir logis, menilai informasi secara objektif, serta menghindari sikap reaktif terhadap provokasi politik di media sosial. Selain itu, interaksi dalam diskusi kelas, forum organisasi, dan kegiatan kemahasiswaan turut menstimulasi pembentukan karakter politik yang matang dan terbuka. Mahasiswa mengedepankan argumentasi yang berbasis data dan prinsip demokrasi dalam menyusun pandangan politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan di bangku kuliah berhasil menumbuhkan etika berpikir kritis dan sikap rasional, yang menjadi landasan penting dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia di era informasi.

Ketiga kategori ini secara menyeluruh menggambarkan bahwa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang memiliki karakteristik sebagai warga negara muda yang adaptif terhadap perubahan zaman, berpikir kritis, dan aktif dalam mewujudkan demokrasi digital yang sehat. Mereka tidak hanya memiliki pemahaman teoritis mengenai demokrasi dan pemilu, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata di ruang digital melalui pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab.

Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa PPKn, tidak dapat lagi dipandang sebagai kelompok yang pasif dalam politik. Justru sebaliknya, mereka menjadi aktor penting dalam menciptakan diskursus publik yang sehat dan konstruktif. Peran mereka semakin strategis karena memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat luas, terutama dalam konteks penyebaran informasi politik yang berbasis literasi digital. Keaktifan mereka dalam membagikan konten edukatif, menyuarakan isu kebangsaan, serta menyaring informasi yang diterima menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi penonton dalam demokrasi, melainkan turut andil dalam memperkuatnya dari dalam.

Lebih dari itu, kesadaran politik yang ditunjukkan oleh para mahasiswa bukan hanya hasil dari faktor eksternal semata seperti arus informasi digital, tetapi juga merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang dibangun melalui pendidikan formal. Sikap mandiri dalam menentukan pilihan politik, keterbukaan terhadap perbedaan pandangan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi mencerminkan kematangan berpolitik yang penting dimiliki oleh generasi muda. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek dari praktik demokrasi, tetapi berkembang menjadi subjek yang berpikir, bersikap, dan bertindak secara sadar dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mahasiswa PPKn tidak hanya menjalankan peran akademis sebagai pelajar di bidang kewarganegaraan, tetapi juga memainkan fungsi sosial sebagai agen perubahan yang memiliki sensitivitas terhadap dinamika politik dan sosial yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks ini, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk terus memperkuat ruang-ruang dialog, diskusi, dan praktik pembelajaran kontekstual yang mendukung pengembangan kompetensi literasi politik mahasiswa, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi dalam tataran teoritis sebagai pemetaan perspektif mahasiswa terhadap pemilu, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pengembangan strategi pendidikan politik yang lebih transformatif, adaptif, dan berkelanjutan. Ke depan, mahasiswa PPKn diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang cerdas secara individual, tetapi juga mampu menginisiasi gerakan kolektif yang membangun budaya politik digital yang sehat, inklusif, dan mencerdaskan. Dengan karakter seperti inilah, mereka dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di era digital yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat partisipasi politik. Mereka menjadi representasi generasi muda yang siap mengambil peran aktif dalam proses demokratisasi di Indonesia melalui cara berpikir kritis, reflektif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Pamulang memiliki perspektif yang positif, kritis, dan reflektif terhadap

pemilu, khususnya dalam konteks era digital yang sarat akan pengaruh media sosial. Perspektif ini tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses pendidikan kewarganegaraan, pengalaman organisasi, paparan informasi digital, serta pengaruh lingkungan sosial yang dialami mahasiswa selama masa studi mereka.

Pemilu dipahami oleh para mahasiswa bukan sekadar sebagai rutinitas politik yang terjadi lima tahun sekali, tetapi lebih dari itu, sebagai perwujudan dari partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi. Mereka memaknai hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap bangsa dan negara, serta sebagai ekspresi dari nilai-nilai konstitusional dan demokrasi yang dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran politik ini mencerminkan kematangan berpikir mahasiswa dan kesiapan mereka dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk perspektif politik mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi saluran utama untuk mengakses informasi politik, mengikuti perkembangan pemilu, hingga berinteraksi secara langsung dengan konten politik dan diskursus publik. Mahasiswa menunjukkan tingkat literasi digital yang baik, ditandai dengan kemampuan mereka dalam memverifikasi informasi, memilah konten yang kredibel, serta bersikap kritis terhadap informasi yang beredar. Mereka mampu membedakan antara opini dan fakta, serta mampu menilai konten politik dari berbagai sumber sebelum membentuk pendapat pribadi.

Lebih dari itu, mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga produsen konten yang aktif menyuarakan pendapatnya di ruang digital. Mereka terlibat dalam diskusi online, menyebarkan konten edukatif, bahkan terlibat dalam kampanye politik yang bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena baru bagi keterlibatan politik generasi muda, sekaligus ruang partisipatif yang memberikan peluang bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi secara bebas dan terbuka.

Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya perspektif mahasiswa terhadap pemilu melalui media sosial terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi latar belakang pendidikan kewarganegaraan yang diperoleh dari perkuliahan, kesadaran pribadi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, serta pengalaman organisasi yang memperkuat kemampuan analisis dan komunikasi politik. Faktor eksternal mencakup paparan terhadap berbagai jenis konten politik di media sosial, pengaruh diskusi dengan teman sejawat di lingkungan kampus, dinamika opini publik menjelang pemilu, serta kecenderungan algoritma digital yang mengarahkan pengguna pada informasi tertentu.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut menghasilkan mahasiswa yang memiliki karakter politik yang kuat, yaitu kritis, mandiri, dan rasional. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang menyesatkan, tetapi justru mampu menjadi aktor yang mencerahkan lingkungan sekitarnya melalui sikap politik yang cerdas dan berbasis nilai. Mereka juga menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan politik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi, dan keterbukaan informasi.

Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk perspektif mahasiswa. Melalui mata kuliah seperti Pendidikan Demokrasi, Hukum Tata Negara, dan Kewarganegaraan Digital, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memperkuat daya pikir kritis mereka terhadap berbagai isu politik. Proses pembelajaran yang interaktif, diskusi kelas, serta keterlibatan dalam organisasi kampus turut membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan kesadaran politik mahasiswa. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam membangun generasi muda yang siap menjadi warga negara aktif dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Pamulang merupakan representasi generasi muda yang adaptif terhadap tantangan zaman, kritis dalam berpikir, dan aktif dalam partisipasi politik digital. Mereka mampu mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dengan dinamika media sosial, serta menjadikan teknologi digital sebagai sarana untuk memperkuat kualitas demokrasi. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa dengan pendekatan pendidikan yang tepat, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam menjaga integritas demokrasi dan menciptakan ruang politik yang sehat dan inklusif di era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi pendidikan politik dan literasi digital di lingkungan perguruan tinggi, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika politik mahasiswa dalam konteks media digital yang terus berkembang.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah pihak terkait perlu mengambil peran strategis dalam membentuk dan menguatkan literasi politik mahasiswa di era digital. Mahasiswa, khususnya di lingkungan Program Studi PPKn maupun program studi lainnya, perlu terus meningkatkan kecakapan literasi digital,

terutama dalam memverifikasi informasi politik yang tersebar di media sosial. Kemampuan ini tidak hanya penting untuk membentengi diri dari misinformasi dan hoaks, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun ekosistem informasi yang edukatif dan konstruktif. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam ruang-ruang diskusi publik, baik secara daring maupun luring, perlu terus didorong guna menumbuhkan budaya berpikir kritis, bertanggung jawab, dan partisipatif sesuai prinsip demokrasi.

Dosen dan pengelola program studi juga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan isu-isu aktual terkait pemilu dan media sosial ke dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan kontekstual seperti studi kasus digital, analisis konten politik, dan simulasi diskusi, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang relevan dan aplikatif. Di sisi lain, pihak pengelola media sosial, baik institusi resmi maupun kreator konten politik, diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang faktual, netral, dan edukatif. Penyampaian informasi yang menarik secara visual tetap harus disertai akurasi dan integritas agar tidak menyesatkan persepsi publik, khususnya generasi muda.

Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu memperluas pendekatan digital dalam menyosialisasikan pemilu kepada generasi muda. Pemanfaatan platform seperti Instagram Live, infografis interaktif, hingga kolaborasi dengan kampus dan komunitas digital dapat meningkatkan efektivitas edukasi politik secara partisipatif. Selain itu, universitas dan lembaga pendidikan tinggi diharapkan menyediakan wadah pembelajaran politik digital yang inklusif, seperti pelatihan pembuatan konten politik, seminar, kompetisi kampanye sehat, serta pengabdian masyarakat yang fokus pada penguatan literasi demokrasi.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan studi dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah informan, lintas program studi, maupun perluasan lokasi penelitian. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan opini politik atau mengkaji peran influencer politik digital dalam keputusan pemilih muda. Pengembangan ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika literasi politik generasi muda di tengah kompleksitas ekosistem informasi digital saat ini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Sulastri, S.Pd., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, yakni mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Pamulang, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data berharga dalam penelitian ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang serta pihak-pihak lain yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z Dalam Pemilu 2024 Di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 975-990.
- Berek, P. F. V. B., & Ridwan. (2024). Analisis tren penelitian literasi digital dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 1–14.
- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik warga negara: Dampak positif dan negatif. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 298–306.
- Hootsuite & We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan penyebaran hoaks di kalangan pengguna media sosial Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Mustopa, E. N. F., Khamila, G., Umam, M. S., Anggraeni, N., & Hermanto, S. P. (2024). Analisis Literasi Digital Terhadap Perilaku Penelusuran Informasi Mahasiswa Sains Komunikasi UNIDA Mengenai Pemilu 2024 di Instagram. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1513-1523.
- Permana, A. A. (2022). Pengaruh media sosial sebagai alat komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(5), 200–209.
- Risnita, R. (2024). Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, M. (2022). *Pengaruh penggunaan media sosial terhadap persepsi politik mahasiswa di era digital*. Jakarta: Pustaka Cendekia.

- Wicaksono, W. Z., et al. (2024). Peran media sosial dalam membentuk opini publik dan sikap politik mahasiswa di kawasan Kampus Sekaran: Analisis dalam konteks Pemilu Presiden 2024. *Jurnal Mediasi*, 3(2), 131–140.
- Winataputra, U. S. (2006). *Konsep dan strategi pendidikan kewarganegaraan di sekolah: Tinjauan psiko-pedagogis*. Pamulang: Universitas Pamulang Press.
- We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>